

## Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan

Nita Tenri Lulu<sup>1\*</sup>, Basri Bado<sup>2</sup>, Muhammad Syafri<sup>3</sup>, Regina<sup>4</sup>, Sri Astuty<sup>5</sup>

<sup>1\*,2,3,4,5</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

Corresponding Email: [nitatenrilulu03@gmail.com](mailto:nitatenrilulu03@gmail.com)<sup>1\*</sup>

**Abstrak.** Pembangunan yang sebelumnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kini mengalami pergeseran menuju pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan, belanja pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran per kapita terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2009–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Sampel penelitian meliputi Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Enrekang. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah sektor kesehatan memiliki nilai prob 0,0006 dan pengeluaran per kapita memiliki nilai prob. 0,0000 sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sementara itu, belanja pemerintah sektor Pendidikan memiliki nilai prob. 0,1459 sehingga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi belanja pendidikan belum diikuti oleh peningkatan kualitas pembangunan manusia, yang diduga disebabkan oleh dominasi belanja pegawai dalam struktur belanja pendidikan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pengalihan fokus belanja pendidikan dari belanja pegawai menuju belanja yang lebih produktif dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan agar mampu mendorong peningkatan IPM secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Indeks Pembangunan Manusia; Belanja Pemerintah; Sektor Kesehatan; Sektor Pendidikan; Pengeluaran Per Kapita.

**Abstract.** Development, previously oriented toward economic growth, has now shifted toward human development. The Human Development Index (HDI) is used as an indicator to measure human welfare through the dimensions of education, health, and purchasing power. This study aims to analyze the influence of government spending in the health sector, government spending in the education sector, and per capita expenditure on the HDI in South Sulawesi Province for the period 2009–2023. This study uses a quantitative approach with a panel data regression method. The study sample includes Makassar City, Palopo City, Parepare City, East Luwu Regency, and Enrekang Regency. Data were analyzed using EViews 12 software. The results of the study indicate that government spending in the health sector has a probability value of 0.0006 and per capita spending has a probability value of 0.0000, thus having a positive and significant effect on the HDI. Meanwhile, government spending in the education sector has a probability value of 0.1459, thus having a negative and insignificant effect on the HDI. This finding indicates that the increase in the allocation of education spending has not been followed by an increase in the quality of human development, which is thought to be caused by the dominance of employee spending in the education spending structure. The implications of this study emphasize the importance of shifting the focus of education spending from employee spending to more productive spending oriented towards improving the quality of education services in order to be able to encourage a sustainable increase in the HDI.

**Keywords:** Human Development Index; Government Spending; Health Sector; Education Sector; Per Capita Expenditure.

## Pendahuluan

Pergeseran paradigma pembangunan dari sekadar pertumbuhan ekonomi perlahan berubah menjadi pembangunan manusia yang sejalan dengan pemikiran Amartya Sen melalui pendekatan kapabilitas. Menurut Sen (1999), pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi dari sejauh mana manusia memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang bernilai, termasuk kemampuan untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, dan mencapai standar hidup yang layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai alat ukur yang merefleksikan taraf kehidupan, yang dimensinya meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan kapabilitas

ekonomi (daya beli) (Lubis *et al.*, 2024). Pada dasarnya, pembangunan merupakan sebuah tahap pergeseran untuk meningkatkan aspek-aspek suatu negara. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia dapat mencerminkan kemajuan suatu negara yang mendeskripsikan taraf kemajuan kapabilitas manusia pada suatu bangsa (Ginting *et al.*, 2023). IPM diterapkan untuk mengevaluasi sejauh mana dampak dari inisiatif peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan semakin berhasil diwujudkan seiring dengan tingginya capaian nilai pada indikator aspek kesehatan, daya beli, dan pendidikan (Anoraga & Rachmansyah, 2022).

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2019	71,66
2020	71,93
2021	72,24
2022	72,82
2023	73,46
Rata-rata	72,42

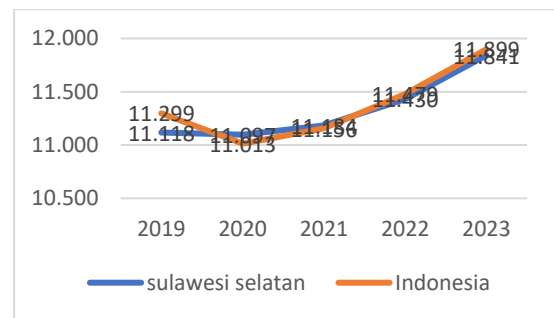
Tabel 1 memaparkan angka IPM Sulawesi Selatan pada periode tahun 2019 hingga 2023 yang terus mengalami peningkatan. Selama kurun waktu tersebut, IPM Sulawesi Selatan telah terklasifikasi dalam kategori tinggi, walaupun belum melampaui rata-rata angka IPM secara nasional. Dari tahun 2019 hingga 2023, angka Indeks Pembangunan Manusia Negara Indonesia lebih besar dibandingkan dengan Sulawesi Selatan. Pada periode 2023, capaian IPM untuk Provinsi Sulawesi Selatan adalah 73,46, sedangkan angka IPM Negara Indonesia sebanyak 73,55 (BPS, 2023). Selisih tersebut sebesar 0,09 poin mencerminkan bahwa secara umum, kualitas hidup masyarakat Sulawesi Selatan masih berada di bawah nilai agregat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa taraf pembangunan manusia di Sulawesi Selatan memerlukan peningkatan, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita agar mampu sejajar dengan capaian nasional. Keterampilan dan pengetahuan masyarakat dapat ditingkatkan dengan pendidikan tinggi yang pada akhirnya akan

meningkatkan produktivitas kerja. Tingginya produktivitas akan meningkatkan pendapatan yang dapat berkontribusi pada peningkatan taraf pendapatan dan tingkat konsumsi rumah tangga, yang selanjutnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Yuli Novitasari & Dila Hapitri, 2019). Perbaikan kualitas manusia dalam sektor pendidikan dan kesehatan dalam kurun waktu yang panjang akan membuat perekonomian semakin bertumbuh dan membuat negara atau daerah berkembang dan maju (Haryono & Murti, 2023). Penanaman modal publik di sektor kesehatan dan pendidikan berkontribusi pada penyediaan akses yang lebih setara bagi masyarakat terhadap layanan kesehatan maupun pendidikan. Dengan demikian, tercipta potensi untuk meningkatkan kapabilitas SDM yang kompeten dan sehat. Peningkatan aspek kesehatan dan pendidikan dapat mengoptimalkan kualitas SDM dan output dari tenaga kerja, yang pada akhirnya mendorong peningkatan taraf pendapatan masyarakat (Iryani & Ramdani, 2019).

Tabel 2. Realisasi Belanja berdasarkan fungsi kesehatan dan pendidikan provinsi sulsel

Tahun	Pendidikan (Miliar/Rp)	Kesehatan (Miliar/Rp)
2019	3.968.671	1.054.687
2020	4.112.630	991.172
2021	2.907.973	729.005
2022	2.887.658	791.729
2023	3.118.971	803.829
Rata-rata	3.399.181	874.084

Tabel 2 menunjukkan perkembangan realisasi belanja pendidikan dan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019–2023. Secara umum, belanja pendidikan berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan belanja kesehatan, yang menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih menjadi prioritas dibandingkan sektor kesehatan dalam struktur APBD provinsi. Pada tahun 2020, belanja pendidikan sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, sebelum mengalami penurunan tajam pada 2021 dan 2022 sebagai dampak dari penyesuaian fiskal selama pandemi COVID-19. Pola serupa terlihat pada belanja kesehatan yang turut menurun pada 2020–2021, namun kembali menunjukkan tren peningkatan sejak 2022 seiring membaiknya kondisi fiskal daerah. Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa dinamika belanja sektor pendidikan dan kesehatan dapat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, khususnya pandemi, serta kemampuan fiskal daerah dalam mempertahankan alokasi pada kedua sektor yang berperan penting dalam pembangunan manusia. Aspek selanjutnya yang dilihat dari kualitas hidup manusia ialah terletak pada standar kehidupan yang berkualitas yang dapat didefinisikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita berfungsi sebagai indikator utama untuk mengukur besaran dana yang dialokasikan oleh rata-rata rumah tangga guna memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Pengeluaran ini mencakup baik perolehan barang maupun pemanfaatan jasa yang esensial bagi kehidupan sehari-hari pada rentang waktu yang spesifik. Berdasarkan hal tersebut, rata-rata pengeluaran yang dialokasikan per kapita adalah cerminan yang efektif guna menilai standar hidup atau kesejahteraan material yang dimiliki oleh suatu populasi (Meilina *et al*, 2024).



Gambar 1. Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Sulsel dengan Indonesia

Pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita di Sulawesi Selatan selama periode 2019–2023 menunjukkan pola yang mirip dengan tren nasional, namun posisi Sulawesi Selatan hampir selalu berada di bawah capaian nasional. Meskipun selisihnya tidak terlalu besar, kondisi ini mencerminkan bahwa daya beli masyarakat Sulawesi Selatan secara konsisten lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Bahkan setelah pandemi mereda dan perekonomian mulai pulih, Sulawesi Selatan tetap belum mampu mengejar capaian nasional. Situasi ini menunjukkan adanya ketertinggalan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Peran pemerintah menjadi krusial dalam memperluas kapabilitas melalui kebijakan belanja publik, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan. Belanja pemerintah diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan layanan dasar, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan tersebut secara efektif. Becker (1964) menyatakan bahwa peningkatan investasi pada pendidikan akan memperbesar modal manusia dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tingkat pengeluaran per kapita mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat yang turut menentukan keberhasilan pembangunan manusia, karena berpengaruh

terhadap akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara umum. Namun demikian, pendekatan kapabilitas Amartya Sen menekankan bahwa peningkatan input pembangunan, seperti besarnya alokasi anggaran, tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kapabilitas manusia apabila tidak diiringi dengan pemanfaatan yang efektif. Hal ini tercermin dalam struktur belanja sektor pendidikan di berbagai daerah yang masih didominasi oleh belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan belanja pendidikan kurang optimal dalam mendorong peningkatan indikator pendidikan dalam IPM. Sejalan dengan penelitian (Harsono, 2024), yang menjelaskan bahwa besarnya belanja pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan IPM apabila alokasinya belum diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Studi tersebut menegaskan bahwa efektivitas belanja publik lebih ditentukan oleh struktur dan kualitas belanja dibandingkan dengan besarnya anggaran semata. Penelitian mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap IPM perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek kuantitas belanja, tetapi juga keterkaitannya dengan pencapaian kapabilitas manusia.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sebagian besar studi masih menggunakan data agregat atau berfokus pada satu wilayah tertentu. Penelitian yang secara eksplisit membandingkan efektivitas belanja pemerintah pada daerah dengan karakteristik fiskal, demografis, dan struktur ekonomi yang berbeda dalam satu provinsi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada lima kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan—Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Enrekang yang merepresentasikan variasi tipologi wilayah, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas belanja publik terhadap peningkatan IPM.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dengan analisis regresi menggunakan struktur panel. Populasi pada penelitian ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan sampel Kota Makassar, Palopo, Parepare, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Enrekang. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (2023), kelima daerah tersebut berada di posisi terbaik dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup yang baik. Kelima daerah tersebut merepresentasikan variasi kapasitas fiskal, jumlah penduduk, dan struktur ekonomi yang berbeda, sehingga relevan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kota Makassar dipilih sebagai daerah dengan tingkat urbanisasi dan kapasitas fiskal tertinggi, sedangkan Kota Palopo dan Kota Parepare mewakili kota berukuran menengah. Kabupaten Luwu Timur dipilih sebagai daerah dengan basis ekonomi sumber daya seperti pertambangan, sementara Kabupaten Enrekang merepresentasikan daerah agraris dengan kapasitas fiskal relatif rendah. Variasi karakteristik tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap perbedaan efektivitas belanja pemerintah dalam meningkatkan IPM serta meningkatkan validitas analisis penelitian. Hal ini dapat diartikan bahwa daerah-daerah tersebut memiliki prestasi pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sumber data pada penelitian ini mencakup data dari website Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Alat analisis pada penelitian ini adalah regresi data panel yang menggabungkan antara data time series dan cross section. Dalam model data panel, persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 BPSK_{it} + \beta_2 BPSP_{it} + \beta_3 PP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y :Indeks Pembangunan Manusia (poin)

$\beta_0$  :Koefisien regresi variabel X

$\beta_1 BPSK$ : Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan (Juta)

$\beta_2$ BPSP: Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan (Juta)

$\beta_3$ PP : Pengeluaran Per Kapita (juta)

i : Observasi

t : waktu

e : error term

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Proses penentuan model akan diawali dengan tiga jenis uji statistik untuk memastikan ketepatan, yakni Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Langrange Multiplier* (LM Test). Persamaan yang digunakan adalah model data panel, yang menggabungkan karakteristik data lintas-bagian (*cross-section*) dan data deret waktu (*time series*), adapun hasil dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Langrange Multiplier

Effectc Test	Prob
Cross-section Chi-Square	0.0000
<i>Cross-section random</i>	0.1261
Breusch-Pagan	(0.0000)

### Uji Chow

Berdasarkan hasil uji Chow di atas, diperoleh nilai probabilitas (0.0000) yang lebih kecil dari 0.05 ( $0.0000 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian, model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

### Uji Hausman

Berdasarkan tabel yang disajikan, hasil uji Hausman mengindikasikan bahwa probabilitas  $0.1261 > 0,05$ . Kondisi ini berimplikasi pada diterimanya hipotesis nol ( $H_0$ ) dan ditolaknya hipotesis alternatif ( $H_1$ ). Dengan demikian, Random Effect Model (REM) ditetapkan sebagai model yang terpilih.

### Uji Langrange Multiplier

Uji Langrange Multiplier memperlihatkan bahwa nilai probabilitas pada Breusch-Pagan sebesar 0.0000, yang nilainya lebih kecil dari alpha ( $0.0000 < 0,05$ ), oleh karena itu  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Maka model yang terpilih adalah Random Effect Model (REM). Untuk memastikan validitas hasil estimasi, penelitian ini melakukan serangkaian uji asumsi

klasik. Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen, sehingga koefisien regresi dapat diinterpretasikan secara stabil. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji kesamaan varians error antar observasi, sementara uji normalitas dilakukan untuk memastikan distribusi residual mendekati distribusi normal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik, sehingga estimasi parameter pada model efek acak dapat dinilai layak dan dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil pemilihan model data panel, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Model ini dipilih karena perbedaan antar individu dianggap bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. REM mampu menangkap variasi data antar waktu dan individu secara efisien serta menghasilkan estimasi parameter yang konsisten. Hasil estimasinya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Data Panel menggunakan Random Effect Model (REM)

Variabel	TH	$\beta$	T hit	Prob	Correlation	Park Test
Independen						
BPSK (X1)	+	4.63E-06	3.618014	0.0006	0.7289	0.694
BPSP (X2)	-	-1.11E-06	-1.470208	0.1459	0.7585	0.557
PPP (X3)	+	0.001958	14.18684	0.0000	0.7513	0.577
Konstanta		49.30185				

Adj. R Square	0.925488
Probability	0.076591
Jarque-Bera	5.138558
F hit	307.3740
Prob. F	0.000000
n	75

Nilai intersep yang dimiliki adalah 49.30185, yang berarti apabila pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan pengeluaran per kapita memiliki nilai nol, maka Indeks Pembangunan Manusia sebesar 49,30 poin. Nilai koefisien belanja pemerintah sektor kesehatan ( $\beta_1$ ) adalah sebesar 4.63E-06, yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan jumlah belanja pemerintah sebanyak 1 juta akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat sebesar 4,63 poin, apabila variabel bebas lainnya memiliki asumsi tetap atau *ceteris paribus*. Artinya, setiap kenaikan belanja sektor kesehatan akan membuat IPM meningkat, karena belanja kesehatan berdampak langsung pada peningkatan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat. Sebaliknya, nilai koefisien belanja pemerintah pada sektor pendidikan ( $\beta_2$ ) adalah -1.11E-06, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah belanja pemerintah sebesar 1 juta akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1,11 poin, juga dengan asumsi tetap. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pendidikan belum mampu secara langsung menaikkan IPM. Di sisi lain, nilai koefisien pengeluaran per kapita ( $\beta_3$ ) adalah 0.001958, yang mengindikasikan bahwa apabila terjadi peningkatan jumlah pengeluaran per kapita sebanyak 1 juta, maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik sebesar 0,0019 poin, dengan asumsi yang sama. Artinya, setiap pengeluaran per kapita yang mengalami peningkatan akan meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, yang berdampak langsung pada peningkatan IPM. Dalam uji parsial (t), variabel belanja pemerintah pada sektor kesehatan (X1) memiliki nilai p-value (Prob)  $< \alpha$  yaitu 0,0006, yang lebih rendah dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa belanja pemerintah sektor kesehatan memberikan pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y), sehingga H0

ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, untuk variabel belanja pemerintah pada sektor pendidikan (X2) memiliki nilai probabilitas 0,1459  $> 0,05$ , yang menyimpulkan bahwa belanja pemerintah sektor pendidikan memiliki dampak positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan (Y). Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya, variabel pengeluaran per kapita (X3) memiliki nilai probabilitas (Prob)  $< \alpha$  yaitu 0,0000  $< 0,05$ , yang menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dalam uji simultan (F), nilai probabilitas sebesar 0,000 menunjukkan adanya signifikansi statistik pada tingkat  $\alpha = 0,05$  (karena 0,000  $< 0,05$ ). Keputusan ini memvalidasi penerimaan hipotesis alternatif (H1), yang berarti bahwa belanja kesehatan (X1), belanja pendidikan (X2), dan pengeluaran per kapita (X3) secara bersama-sama memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Y) secara signifikan. Uji normalitas menunjukkan bahwa statistik Jarque-Bera sebesar 5.138558 dengan probabilitas 0.0765, yang lebih besar dari 0,05, mengindikasikan bahwa galat dalam model regresi memiliki sebaran data yang normal, meskipun terdapat sedikit kemiringan positif pada pola distribusinya. Untuk uji multikolinearitas, nilai korelasi masing-masing variabel adalah 0,7289 untuk belanja kesehatan (X1), 0,7585 untuk belanja pendidikan (X2), dan 0,7513 untuk pengeluaran per kapita (X3), yang menunjukkan bahwa nilai ini lebih kecil dari 0,85, sehingga model regresi yang dibentuk tidak memiliki masalah multikolinearitas. Terakhir, uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel belanja kesehatan (X1) memiliki nilai sebesar 0,694, belanja pendidikan (X2) sebesar 0,557, dan pengeluaran per kapita (X3) sebesar 0,577. Karena semua nilai probabilitas di atas 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## Pembahasan

Pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan hasil yang signifikan, dengan nilai probabilitas  $0,0006 < 0,05$  dan koefisien  $4.63E-06$ . Ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara belanja pemerintah pada sektor kesehatan (X1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Susanti & Hidayat (2020), yang juga menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah untuk sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap peningkatan capaian IPM. Hasil penelitian ini relevan dengan teori Musgrave (1989), yang menguraikan fungsi belanja pemerintah sebagai instrumen alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam perekonomian. Dalam konteks ini, belanja kesehatan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan sebagai modal dasar pembangunan manusia. Ketika masyarakat memiliki kondisi fisik yang sehat dan akses layanan kesehatan yang baik, produktivitas meningkat dan kualitas hidup pun membaik, sehingga secara langsung memberikan dampak pada peningkatan IPM.

Hasil temuan ini menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, di mana belanja pemerintah di sektor kesehatan terbukti memiliki keterkaitan positif dan signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Keadaan ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja pemerintah untuk sektor kesehatan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Sebaliknya, belanja pemerintah sektor pendidikan (X2) memiliki nilai probabilitas  $0,1459 > 0,05$  dan koefisien  $-1.11E-06$ , yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Siregar (2023) dan Kusuma & Arif (2022), yang menyatakan bahwa setiap kenaikan belanja pemerintah di sektor pendidikan justru cenderung menurunkan angka Indeks Pembangunan Manusia. Dampak

negatif ini disebabkan karena belanja pemerintah untuk pendidikan membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan dampak positif, sekitar 15 tahun dalam pengembangan sumber daya manusia. Meskipun penelitian ini telah menggunakan rentang waktu yang sama, hasil yang ditunjukkan tetap negatif dan tidak signifikan, memperkuat dugaan bahwa struktur belanja pendidikan di Sulawesi Selatan masih belum optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kesimpulan ini tidak selaras dengan pendapat Becker (1964) yang menyatakan bahwa peningkatan investasi pada pendidikan akan memperbesar modal manusia dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, efektivitas penggunaan anggaran menjadi faktor penentu apakah belanja tersebut benar-benar meningkatkan kualitas pembangunan manusia, di mana Indeks Pembangunan Manusia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan secara proporsional karena model empiris yang digunakan belum sepenuhnya menangkap kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan manusia.

Selanjutnya, variabel pengeluaran per kapita (X3) memiliki nilai probabilitas  $0,0000 < 0,05$  dan koefisien  $0,001958$ , yang menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel IPM. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Akbar (2023), yang menyatakan bahwa pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Interpretasi ini menegaskan penyelesaian terhadap permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini, di mana pengeluaran per kapita berkorelasi positif dengan peningkatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, peningkatan pengeluaran per kapita dapat dilihat sebagai indikator penting yang mendorong pencapaian IPM. Hasil analisis ini juga sejalan dengan perspektif Alderman dan Morris (1997), yang menekankan bahwa

pengeluaran rumah tangga adalah indikator utama kesejahteraan manusia, terutama di negara berkembang. Mereka menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran tidak hanya mencerminkan peningkatan pendapatan, tetapi juga menunjukkan peningkatan kapasitas rumah tangga dalam berinvestasi pada gizi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, pengeluaran per kapita menjadi indikator nyata dari kemampuan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang bermartabat dan memiliki daya produktivitas yang tinggi. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia tidak bersifat homogen antar sektor. Pengaruh positif dan signifikan belanja sektor kesehatan serta pengeluaran per kapita sejalan dengan Capability Approach yang menekankan pentingnya pemenuhan kemampuan dasar, seperti kesehatan dan daya beli, dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Sebaliknya, temuan bahwa belanja pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan belum secara otomatis meningkatkan kualitas modal manusia sebagaimana dijelaskan dalam Human Capital Theory. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas belanja pendidikan sangat dipengaruhi oleh struktur dan kualitas alokasinya, sehingga akumulasi modal manusia tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh bagaimana anggaran tersebut dikelola dan dimanfaatkan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah sektor kesehatan serta pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaliknya, belanja pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa belanja berdasarkan fungsi pendidikan masih terserap pada belanja pegawai, seperti pembayaran gaji, tunjangan, serta belanja rutin

lainnya, sehingga alokasi yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, fasilitas pendidikan, dan sarana pendukung lainnya masih terbatas. Akibatnya, belanja pendidikan tidak memberikan dampak yang cukup kuat untuk meningkatkan capaian indikator pendidikan, seperti Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, yang berperan langsung dalam pembentukan IPM. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti mengembangkan model dengan memisahkan belanja pemerintah sektor pendidikan ke dalam komponen belanja pegawai dan belanja non-pegawai, seperti belanja barang dan belanja modal, guna mengidentifikasi komponen belanja yang lebih efektif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Selain itu, penggunaan variabel lag pada belanja pendidikan perlu dipertimbangkan, mengingat dampak pendidikan terhadap pembangunan manusia bersifat jangka menengah hingga panjang, sehingga pengaruhnya tidak selalu tercermin secara langsung dalam periode pengamatan tahunan. Berdasarkan hasil penelitian, belanja pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran per kapita terbukti berperan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, sehingga pemerintah daerah perlu mempertahankan dan mengoptimalkan efektivitas belanja pada kedua komponen tersebut. Sementara itu, belanja pemerintah sektor pendidikan perlu diarahkan melalui optimalisasi komposisi belanja, khususnya dengan mengurangi dominasi belanja pegawai dan meningkatkan porsi belanja yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, perencanaan kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan karakteristik dampak jangka menengah hingga panjang agar alokasi anggaran pendidikan dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap peningkatan IPM.

## Daftar Pustaka

- Akbar, A., dkk. (2023). Pengaruh pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera periode 2018–2021. *Jurnal Ilmiah Ekonomika*, 16(July), 1–23.

- Anoraga, P., & Rachmansyah, Y. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang. *Jurnal AKTUAL*, 20(1), 212–222. <https://doi.org/10.47232/aktual.v20i1.157>.
- Badan Pusat Statistik. (2023). (Metode baru) Pengeluaran per kapita disesuaikan, 2024 (1).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). Belanja pemerintah berdasarkan fungsi kesehatan dan pendidikan.
- Ginting, D. I., Lubis, I., Lubis, I., & Lubis, I. (2023). Pengaruh angka harapan hidup dan harapan lama sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 519–528. <https://doi.org/10.46576/bn.v6i2.3884>.
- Harsono, dkk. (2024). The influence of education expenditure, health expenditure and social assistance expenditure on human development index in NTB Province in 2013-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 802–810.
- Haryono, S., & Murti, W. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(3).
- Iryani, E., & Ramdani, A. S. (2019). Kajian Indeks Pembangunan Manusia.
- Kusuma, A. P., & Arif, M. (2022). An analysis of the effectiveness of local government expenditure allocations in education, health, social assistance, and per capita income on the human development index in the Pati residency. *Atlantis Press*, 655.
- Lubis, C. S. L., Sari, C. M., Syahfitri, T. I., & Suharianto, J. (2024). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara tahun 2019-2022. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 738–755.
- Musgrave. (1989). *Public finance in theory and practice*. Library of Congress Cataloging.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom* (4th ed.). Random House.
- Siregar, Z. (2023). Pengaruh alokasi belanja pendidikan, kesehatan dan sosial terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 4(1), 9–18. <https://doi.org/10.30596/jisp.v4i1.13030>.
- Statistik, B. P. (2023). Indeks Pembangunan Manusia 2023. Badan Pusat Statistik.
- Susanti, E., & Hidayat, N. (2020). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *Eco-Build Journal*, 4(2), 25–34.
- Yuli Novitasari, & Dila Hapitri. (2019). Realisasi belanja pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengaruhnya terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala Repositori IMWI*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v2i1.14>.